

ABSTRAK

Pasal 58 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Digunakan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Sampang. Namun pada Substansinya Mahkamah Konstitusi menggunakan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota padahal peraturan ini telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Permasalahan juga terdapat pada proses penentuan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah ketepatan Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan serta bagaimana proses penentuan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) dengan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep.

Berdasarkan pada kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tidak tepat, karena berdasarkan asas Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah atau Asas *lex superior derogat legi inferiori*, menunjukkan bahwa seharusnya Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan hukum harus menggunakan Undang – Undang yang baru. Mengenai proses penentuan jumlah Daftar Pemilih Tetap, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan karena tidak memedomani aturan yang telah diterapkan dalam penentuan jumlah DPT.

Kata kunci : *Putusan, pertimbangan Hakim, daftar pemilih tetap*

ABSTRACT

Article 58 of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. by the Judge as a basis for legal considerations in the Constitutional Court Decision Number 38 / PHP.BUP-XVI / 2018 concerning the Re-voting of Sampang Regency. However, in substance the constitutional court uses Article 58 of Law Number 8 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors even though this regulation has been amended by Law No. 10 of 2016 concerning Election of Governors, Regents and Mayors. Problems also occur in the process of determining the number of Final Voters List carried out by the General Election Commission who are not in accordance with the rules that have been applied. Therefore, the problem raised in this research is the accuracy of the Judge in providing legal considerations in the decision and how the process of determining the number of Final Voters List is carried out by the General Election Commission of Sampang Regency.

The research method used is a normative legal research method with the method of legislative approach and conceptual approach.

Based on the study conducted it can be concluded that the basic legal considerations given by the Constitutional Court Judges are not appropriate, because based on the principle of a higher regulation defeating the lower regulation or Lex superior inferior legio derogate, indicating that the Judge in providing a legal basis must use the new Law. Regarding the process of determining the number of Final Voters List, the General Election Commission has violated the election administration because it does not follow the rules that have been applied in determining the number of Final Voters List.

Keywords: Decision, Judge consideration, Final Voter List.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	2
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan	9
1.4 Kegunaan	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Keaslian	10
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Metode Pendekatan	12
1.6.2.1 Pendekatan Peundang – Undangan	12
1.6.2.2 Pendekatan Konseptual	12
1.6.3 Bahan Hukum	13
1.6.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	15
1.7 Sistematika Penulisan	15
1.7.1 Bab I Pendahuluan	15
1.7.2 Bab II Tinjauan Pustaka	15
1.7.3 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	16
1.7.4 Bab IV Penutup	16
BAB II PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERSELISIHAN HASIL PEMIIHAN KEPALA DAERAH	17
2.1 Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi.....	17

2.2 Jenis Dan Pengertian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah	23
2.3 Pengertian Pemungutan Suara Ulang.....	28
2.4 Teori – Teori	29
2.4.1 Teori Organ dan Lembaga Negara.....	29
2.4.2 Teori Peraturan Perundang – Undangan	31
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	37
3.1.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	37
3.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018.....	41
3.2 Penerapan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang	50
3.2.1 Mekanisme Pemilihan Suara Ulang Dalam Peraturan Perundang – Undangan	60
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perubahan Pengaturan Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap 46

Tabel 2 Tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota .. 58